

KONFLIK SOSIAL DALAM PENGELOLAAN WISATA HIU PAUS DESA LABUHAN JAMBU KECAMATAN TARANO KABUPATEN SUMBAWA

Bintang Dwi Kayant^{1*}, Fahrunnisa²

¹²Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Penulis Korespondensi: bintangdwikayanti@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History Received: 26 Juni 2026 Accepted: 02 Agustus 2026 Published: 31 Agustus 2026	<i>The development of whale shark tourism in Labuhan Jambu Village, Tarano District, Sumbawa Regency, has created new economic opportunities for the local community. The presence of this tourism activity has encouraged shifts in livelihoods, increased local economic activity, and stimulated the growth of various tourism-supporting businesses. However, alongside these benefits, social dynamics have emerged in the form of conflicts triggered by differences in access to tourism management, authority in decision-making, and the distribution of economic benefits among the parties involved. Therefore, this study aims to examine social conflict in the management of whale shark tourism in Labuhan Jambu Village. This study employs a qualitative approach using a case study method. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and were subsequently analyzed using the Miles and Huberman model, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that social conflict originated from changes in the tourism management system, which had previously been community-based but became more formalized after the Regional Public Service Agency (BLUD) was designated as the official manager of the marine tourism area. These changes gave rise to differing interests concerning authority, management access, and the distribution of economic benefits among the village government, BLUD, conservation organizations, tourism operators, Pokdarwis, Pokmaswas, bagang owners, boat owners, MSME operators, and fishing communities. Thus, the sustainability of whale shark tourism requires a more equitable, transparent, and participatory governance system that provides equal opportunities for all community groups to benefit from tourism activities.</i>
Keywords Social Conflict; Tourism Management; Whale Shark Tourism.	

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional karena melibatkan berbagai dimensi, seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Sektor pariwisata juga berperan penting dalam upaya peningkatan pendapatan (Aprillianto *et al.*, 2024). Oleh karena itu, dengan potensi alam dan budaya yang dimiliki Indonesia, pengembangan pariwisata perlu terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip kepariwisataan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Suranto (2021), menegaskan bahwa pembangunan pariwisata harus memberdayakan masyarakat lokal, mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata, serta menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kelestarian lingkungan destinasi wisata. Dengan demikian adanya pariwisata yang berkelanjutan dapat dipastikan mampu memberdayakan masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial maupun budaya.

Wisata bahari merupakan salah satu sektor pariwisata andalan Indonesia dikarenakan sebagian besar wilayahnya adalah laut dengan panjang pantai hingga 99.083 km. Potensi wisata bahari yang sangat besar sehingga membutuhkan perencanaan yang cermat oleh daerah-daerah yang memiliki wilayah laut.

Pengembangan wisata bahari tidak hanya berpotensi meningkatkan penghidupan masyarakat pesisir melalui potensi alam, tetapi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja dan penguatan ekonomi lokal. Jika ini dilakukan secara beruntun akan ada pengaruh dan perubahan mendasar pada kesadaran global tentang pengelolaan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan sesuai dengan harapan (Supriyanto, 2022). Melalui pengelolaan yang tepat, pariwisata diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan, serta menjaga keberlanjutan ekosistem laut (Yahya, 2021). Namun, dalam praktiknya, pengelolaan wilayah pesisir yang berkaitan dengan aktivitas pariwisata tidak selalu berjalan tanpa persoalan, menurut Baihaqi & Annida (2024), perubahan nilai-nilai budaya, gaya hidup, dan potensi konflik sosial seringkali menjadi dampak negatif yang harus diwaspadai.

Konflik dalam pengelolaan pariwisata bahari dapat muncul akibat meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam pesisir seiring dengan berkembangnya aktivitas wisata. Kondisi ini menunjukkan bahwa pariwisata bahari tidak hanya membawa manfaat ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial apabila tidak dikelola dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam penelitian Jaka *et al.* (2021) yang menunjukkan bahwa pengembangan ekowisata bahari memicu konflik antara pengembang pariwisata dan masyarakat lokal akibat berkurangnya ketersediaan air sebagai dampak pembangunan infrastruktur pariwisata. Pola konflik serupa juga berpotensi terjadi dalam pengelolaan wisata hiu paus, di mana kepentingan ekonomi pariwisata berhadapan dengan upaya pelestarian lingkungan. Hal demikian dapat memicu terjadinya konflik dalam sistem pengelolaan yang tidak adil dan tidak sesuai kebutuhan masyarakat.

Studi Eraku *et al.* (2023) yang dilakukan di Desa Batubarani, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, menunjukkan bahwa konflik juga mendorong perubahan struktur ekonomi masyarakat. Pada awalnya masyarakat berprofesi sebagai nelayan, lalu kemudian beralih menjadi pemandu wisata hiu paus. Perubahan tersebut mengidentifikasi adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata yang memenuhi indikator lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya. Namun demikian, pergeseran peran dan kepentingan antar kelompok masyarakat tetap berpotensi menjadi sumber konflik apabila tidak diiringi dengan pengelolaan pariwisata yang adil dan berkelanjutan. Penelitian Gatra (2024) menunjukkan bahwa ekowisata hiu paus di Indonesia memang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain berpotensi mengancam keberlanjutan hiu paus akibat meningkatnya stres, luka fisik, dan gangguan kesehatan akibat aktivitas wisata yang berlebihan. Dengan demikian, konflik dalam wisata hiu paus dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika konflik pariwisata bahari yang melibatkan perbedaan kepentingan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, merupakan salah satu wilayah pesisir yang memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata bahari. Kekayaan ekosistem laut serta keindahan alam pesisir yang beragam menjadikan wilayah ini memiliki daya tarik wisata yang terus berkembang di tengah masyarakat. Salah satu bentuk wisata bahari yang menonjol adalah wisata hiu paus di Teluk Saleh, tepatnya di Desa Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano. Kehadiran wisata hiu paus ini menempatkan Sumbawa sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki destinasi wisata berbasis konservasi hiu paus. Secara ekologis, kawasan Teluk Saleh merupakan habitat yang ideal bagi hiu paus karena perairannya kaya akan sumber makanan berupa plankton. Hal ini dibuktikan dalam penelitian Widiawati *et al.* (2025) yang menunjukkan bahwa hiu paus cenderung menetap di perairan Teluk Saleh karena

kondisi lingkungan yang mendukung keberlangsungan hidupnya. Hiu Paus sendiri merupakan spesies ikan terbesar di dunia yang bersifat jinak dan dikenal sebagai pemakan plankton dengan cara menyaring air saat makan, sehingga keberadaannya memiliki daya tarik tersendiri bagi aktivitas wisata bahari.

Seiring dengan meningkatnya perhatian publik terhadap wisata hiu paus, destinasi ini mulai dikenal hingga di tingkat nasional. Perkembangan wisata tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat otonomi desa melalui pengelolaan potensi lokal. Dalam konteks pembangunan desa, pariwisata dipandang sebagai salah satu sektor yang dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat pesisir. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola sumber daya dan pembangunan secara mandiri. Penelitian Januarti (2022) menjelaskan bahwa kebijakan otonomi desa bertujuan mendorong transformasi desa melalui pemberdayaan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, demokratisasi desa, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu dipandang sebagai peluang strategis untuk mendukung pembangunan desa berbasis potensi lokal.

Wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu kini menjadi salah satu ikon wisata bahari di Kabupaten Sumbawa. Daya tarik utama destinasi ini terletak pada keberadaan hiu paus sebagai spesies yang dilindungi dan tidak berbahaya bagi manusia, sehingga menarik minat wisatawan. Pada fase awal kemunculannya, sebagian nelayan memandang kehadiran hiu paus sebagai gangguan terhadap aktivitas penangkapan ikan. Namun, seiring meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap potensi ekonomi pariwisata, pandangan tersebut mulai mengalami perubahan. Potensi wisata yang sebelumnya dianggap menghambat mata pencaharian kini mulai dipersepsikan sebagai peluang ekonomi baru. Perubahan ini menunjukkan adanya dinamika sosial dalam masyarakat pesisir yang beradaptasi terhadap transformasi ekonomi lokal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hariyadi *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa *community-based tourism* (CBT) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan wisata.

Di balik perkembangan pariwisata hiu paus yang pesat, muncul pula dampak sosial yang tidak dapat diabaikan. Tidak seluruh masyarakat merasakan manfaat ekonomi dari keberadaan wisata tersebut secara merata. Sebagian warga justru menolak pengembangan wisata karena merasa tidak memperoleh keuntungan langsung dan bahkan menganggapnya merugikan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan sosial di antara masyarakat yang tinggal dalam satu wilayah, tetapi memiliki akses yang berbeda terhadap pemanfaatan wisata. Perbedaan akses tersebut memicu ketegangan sosial yang berkembang menjadi konflik antar kelompok masyarakat di Desa Labuhan Jambu. Fenomena serupa ditemukan dalam penelitian Ristiawan dan Tiberghien (2021) di Desa Wisata Nglanggeran, Yogyakarta, yang menunjukkan bahwa praktik CBT menghadapi tantangan berupa ketimpangan distribusi manfaat ekonomi di tingkat lokal. Dengan demikian, konflik yang muncul di Labuhan Jambu mencerminkan dinamika sosial masyarakat pesisir yang dihadapkan pada perbedaan kepentingan terhadap pemanfaatan sumber daya.

Sejauh ini penelitian mengenai pariwisata hiu paus di wilayah Sumbawa, terkhususnya di Desa Labuhan Jambu, umumnya berfokus pada potensi ekonomi dan perubahan perilaku sosial masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam penelitian Wijayanti (2024) dan Nurhidayati (2022) yang menekankan aspek pengembangan pariwisata serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, kajian yang secara khusus membahas konflik sosial akibat perbedaan kepentingan antar kelompok masyarakat

masih relatif terbatas. Dalam penelitian ini ada dua kesenjangan yang di angkat, yaitu kesenjangan empiris berupa data yang berasal dari hasil observasi dan kesenjangan ilmiah berupa adanya fenomena yang belum banyak diteliti sebelumnya (Aini, 2024). Secara empiris, kondisi di lapangan telah memunculkan konflik yang nyata antara kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan berbeda dalam pengelolaan dan pemanfaatan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu. Sementara itu, secara ilmiah masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji konflik sosial tersebut dalam konteks pariwisata hiu paus di tingkat Desa. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menelaah dinamika konflik sosial yang muncul akibat berkembangnya wisata hiu paus. Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada: konteks lokal Desa Labuhan Jambu, fokus terhadap konflik sosial pada wisata hiu paus berbasis konservasi, dan analisis relasi kuasa dan akses manfaat antaraktor.

Keberadaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu tidak hanya menghadirkan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat, tetapi juga memunculkan dinamika sosial yang cukup kompleks di antara berbagai aktor yang terlibat, seperti pemerintah desa, kelompok pengelola wisata, dan masyarakat lokal, khususnya nelayan. Perkembangan pariwisata ini pada satu sisi membuka kesempatan ekonomi baru melalui aktivitas wisata, namun pada sisi lain juga berpotensi menimbulkan ketegangan sosial akibat perbedaan akses terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya wisata tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata tidak selalu berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Apabila tidak dikelola secara adil dan partisipatif, aktivitas pariwisata justru dapat memperbesar ketimpangan sosial di tingkat lokal, terutama antara kelompok yang memiliki akses lebih besar terhadap pengelolaan wisata dan kelompok masyarakat yang berada di luar struktur tersebut.

Situasi tersebut kemudian memunculkan perbedaan kepentingan antar ke-lompok masyarakat yang berpotensi berkembang menjadi konflik sosial. Perbedaan kepentingan ini berkaitan dengan persoalan kewenangan dalam pengambilan keputusan, serta pembagian manfaat yang dihasilkan dari kegiatan wisata hiu paus. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana struktur wewenang dalam pengelolaan wisata terbentuk, bagaimana perbedaan kepentingan antar kelompok masyarakat muncul, serta bagaimana dinamika konflik sosial berkembang di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada konflik sosial yang muncul akibat perbedaan akses, kewenangan, dan distribusi manfaat dalam pengelolaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika konflik tersebut sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan tata kelola pariwisata hiu paus yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Sugiyono (2021), penelitian kualitatif adalah metode riset yang fokus pada pemahaman mendalam mengenai makna, pengalaman, dan fenomena sosial. Sementara pendekatan studi kasus adalah metode penelitian kualitatif yang meneliti suatu kejadian, masalah, individu, atau kelompok secara mendalam dan rinci dalam konteks kehidupan nyata. Pendekatan ini bertujuan memahami alasan dan proses di balik suatu peristiwa. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan data berupa kata-kata atau narasi, bukan angka atau statistik, serta dilakukan pada kondisi lingkungan yang alami untuk memahami bagaimana fenomena sosial yang terjadi di Desa Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa Besar.

Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian dalam kajian ini berfokus pada dampak sosial yang timbul akibat pengelolaan pariwisata Hiu Paus di Desa Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa. Pemilihan objek ini didasarkan pada kenyataan bahwa pengembangan pariwisata berbasis konservasi seperti wisata Hiu Paus tidak hanya berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan gesekan sosial apabila pengelolaannya tidak dijalankan secara inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti dinamika sosial yang berkembang di antara para aktor yang terlibat langsung dalam aktivitas pariwisata, seperti masyarakat lokal, pelaku usaha wisata, serta pihak pemerintah desa yang memiliki perbedaan kepentingan dalam proses pengelolaan pariwisata tersebut.

Sementara subjek penelitian adalah pihak atau individu yang menjadi sumber data dalam penelitian. Pada penelitian ini, penentuan subjek penelitian dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, informan dalam penelitian ini terdiri atas informan kunci dan informan pendukung.

1. Informan Kunci

Informan kunci merupakan pihak yang memiliki pengetahuan yang lebih mendalam mengenai proses pengelolaan wisata hiu paus serta dinamika konflik yang terjadi. Informan kunci dalam penelitian ini, antara lain pemerintah desa serta pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu.

2. Informan Pendukung

Informan pendukung merupakan pihak yang memiliki pengalaman atau keterkaitan dengan aktivitas wisata hiu paus namun tidak secara langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan wisata. Informan pendukung dalam penelitian ini, meliputi masyarakat lokal seperti nelayan serta pelaku usaha yang berada di sekitar kawasan wisata.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam penelitian karena melalui proses tersebut peneliti memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Menurut Sugiyono (2021), teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut digunakan secara bersamaan untuk memperoleh data yang lebih mendalam mengenai konflik sosial dalam pengelolaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (2019) yang meliputi tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi, tabel, dan bagan untuk memudahkan pemahaman. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian dengan mengacu pada teori kepemimpinan transformasional.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai informan yang berbeda (kepala sekolah, guru, dan siswa). Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data,

yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memvalidasi temuan penelitian (Sugiyono, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Untuk memahami akar konflik dalam pengelolaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu, peneliti melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara langsung dengan beberapa informan untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan wisata hiu paus, proses pembentukan struktur pengelolaan, serta kronologi perkembangan wisata hingga terjadinya eskalasi konflik sosial di Desa Labuhan Jambu.

1. Perkembangan Pariwisata Hiu Paus

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pengelolaan wisata hiu paus pada tahap awal perkembangannya masih dilakukan secara sederhana dan belum memiliki struktur pengelola yang bersifat formal. Dalam proses tersebut mulai ditentukan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan wisata, seperti operator wisata, pengelola perahu, dan masyarakat yang berperan dalam promosi wisata melalui musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, kelompok masyarakat, dan pihak konservasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sejak awal telah terbentuk pembagian kewenangan dalam pengelolaan wisata, meskipun masih bersifat sederhana dan berbasis kesepakatan bersama. Keberadaan berbagai pihak yang memiliki peran dalam pengelolaan wisata secara tidak langsung mulai membentuk struktur otoritas dalam kegiatan wisata hiu paus. Pada tahap ini hubungan antaraktor masih berjalan relatif harmonis karena tujuan utama yang ingin dicapai adalah mengembangkan wisata sebagai sumber ekonomi baru bagi masyarakat. Namun demikian, pembagian kewenangan dan peran yang mulai terbentuk tersebut menjadi dasar munculnya dinamika pengelolaan wisata pada periode-periode berikutnya.

Jika ditinjau menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf, kondisi tersebut menunjukkan mulai terbentuknya struktur otoritas dalam pengelolaan wisata hiu paus. Dahrendorf menjelaskan bahwa otoritas tidak dipahami sebagai kekuasaan yang dimiliki secara pribadi, tetapi merupakan unsur yang melekat dalam setiap organisasi sosial dan menjadi dasar terbentuknya hubungan kekuasaan di antara individu maupun kelompok (Susilo, 2021). Pada fase awal pengembangan wisata hiu paus, otoritas belum terpusat pada satu pihak tertentu, melainkan masih tersebar di antara lembaga konservasi, pemerintah desa, dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan wisata. Meskipun pada tahap ini belum terlihat konflik yang terbuka, pembagian kewenangan yang mulai terbentuk tersebut menjadi fondasi bagi munculnya perbedaan kepentingan dan perebutan pengaruh dalam pengelolaan wisata hiu paus pada tahap selanjutnya.

2. Kronologi Perkembangan Wisata dan Eskalasi Konflik Sosial

Berdasarkan hasil peneliti yang telah lakukan, diketahui bahwa konflik dalam pengelolaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan berkembang melalui serangkaian peristiwa yang berlangsung sejak awal kemunculan wisata hingga berkembangnya sistem pengelolaan yang lebih formal. Pada tahap awal, hubungan antaraktor masih berjalan relatif harmonis karena seluruh pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu mengembangkan potensi wisata hiu paus sebagai sumber ekonomi baru bagi masyarakat. Namun, seiring meningkatnya aktivitas wisata, bertambahnya jumlah wisatawan, serta perubahan struktur pengelolaan dan distribusi kewenangan, mulai muncul perbedaan kepentingan di antara aktor-aktor yang terlibat.

Meskipun pengelolaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu melibatkan berbagai aktor dengan peran yang berbeda, keterlibatan tersebut tidak diikuti dengan distribusi kewenangan, akses, dan manfaat yang diterima secara merata. Sebagian aktor memiliki otoritas dalam menentukan kebijakan dan mengatur jalannya pengelolaan wisata, sedangkan sebagian lainnya hanya berada pada posisi menjalankan serta mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Perbedaan tersebut kemudian memengaruhi pola hubungan antaraktor dan berkembang menjadi konflik yang semakin kompleks dari waktu ke waktu.

Dalam perspektif teori konflik Dahrendorf, kondisi tersebut menunjukkan adanya pembagian posisi aktor ke dalam kelompok superordinat sebagai pihak yang memiliki otoritas, dan kelompok subordinat sebagai pihak yang berada pada posisi mengikuti kebijakan dalam struktur pengelolaan wisata hiu paus.

a. Superordinat

Kelompok superordinat merupakan kelompok yang memiliki otoritas untuk mengatur, membuat kebijakan, serta mengendalikan jalannya suatu sistem sosial (Susilo, 2021). Dalam pengelolaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu, aktor yang memiliki posisi superordinat dalam pengelolaan wisata hiu paus meliputi Pemerintah Desa, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta operator wisata. Ketiga aktor tersebut memiliki peran yang berbeda, namun sama-sama mempunyai pengaruh dalam menentukan arah pengelolaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu. Dalam perspektif Dahrendorf, perbedaan kepentingan objektif ini menjadi dasar munculnya potensi konflik karena setiap aktor berupaya mempertahankan kepentingan yang melekat pada posisi mereka dalam sistem pengelolaan wisata hiu paus.

b. Subordinat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata hiu paus masih belum merata dan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Masyarakat mulai menyadari bahwa mereka kurang diuntungkan dalam sistem pengelolaan wisata hiu paus, karena mereka tidak memperoleh kesempatan yang sama untuk terlibat dalam aktivitas wisata maupun menikmati manfaat ekonomi yang dihasilkan. Kesadaran inilah yang selanjutnya menjadi dasar terbentuknya kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang sama dalam memperjuangkan hak dan kepentingannya dalam pengelolaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu. Dalam perspektif Dahrendorf, kondisi ini menunjukkan bahwa potensi konflik yang sebelumnya masih bersifat laten mulai berkembang menjadi kesadaran kolektif di kalangan masyarakat.

3. Implikasi Konflik Terhadap Kondisi Sosial

Perbedaan posisi, akses, dan distribusi manfaat dalam pengelolaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu memengaruhi hubungan sosial antaraktor serta mendorong munculnya berbagai dinamika di tengah masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, implikasi tersebut terlihat dari terbentuknya kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang sama, ketimpangan distribusi manfaat, berkembangnya harapan masyarakat terhadap keberlanjutan wisata, serta meningkatnya penyampaian keluhan sebagai respons terhadap pengelolaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu.

a. Terbentuknya Kelompok Kepentingan (*Interest Group*)

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kelompok kepentingan dalam pengelolaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu mulai terbentuk ketika sebagian masyarakat yang merasa kurang memperoleh manfaat wisata, mulai menyuarkan ketidakpuasan mereka terhadap sistem pengelolaan wisata.

Ketidakpuasan tersebut tidak lagi dibicarakan secara individual melalui forum-forum resmi, tetapi mulai disampaikan dengan tindakan kolektif yang dilakukan masyarakat. Salah satu peristiwa yang menunjukkan hal tersebut adalah penyegelan kantor BLUD yang dilakukan sebagai bentuk protes terhadap persoalan pemanfaatan ruang laut dan keberadaan nelayan luar yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah perairan Labuhan Jambu.

Dalam perspektif Dahrendorf, tindakan semacam ini menunjukkan bahwa konflik yang sebelumnya masih bersifat laten, mulai berkembang menjadi konflik yang lebih nyata (*manifest conflict*). Konflik sosial yang muncul dalam pengelolaan wisata hiu paus tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga berkaitan dengan distribusi otoritas dan akses terhadap sumber daya yang tidak dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

b. Ketimpangan Distribusi Manfaat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat wisata hiu paus belum dirasakan oleh seluruh masyarakat Desa Labuhan Jambu. Temuan ini memperlihatkan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh wisata hiu paus belum sepenuhnya terdistribusi secara merata, sebagian masyarakat merasa bahwa keuntungan wisata hanya dinikmati oleh kelompok tertentu yang memiliki akses langsung terhadap pengelolaan wisata. Kondisi tersebut menimbulkan rasa kecewa, kecemburuan sosial, dan ketidakpuasan terhadap sistem pengelolaan yang berjalan saat ini, sehingga menjadi faktor yang memperkuat dinamika konflik dalam pengelolaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu.

Dalam perspektif teori konflik Dahrendorf, kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan kepentingan yang lahir dari posisi yang berbeda dalam struktur pengelolaan wisata. Kelompok yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan cenderung memperoleh manfaat yang lebih besar dibandingkan kelompok yang berada di luar struktur pengelolaan. Ketimpangan distribusi manfaat ini kemudian melahirkan kepentingan subjektif di kalangan masyarakat yang merasa dirugikan, yang ditunjukkan melalui berbagai bentuk keluhan, kritik, dan tuntutan terhadap sistem pengelolaan wisata yang dianggap belum adil.

c. Harapan Terhadap Keberlanjutan Wisata

Secara keseluruhan, masyarakat Desa Labuhan Jambu memiliki harapan besar terhadap masa depan wisata hiu paus. Namun, keberlanjutan wisata tersebut sangat bergantung pada kemampuan seluruh pihak dalam membangun tata kelola yang lebih adil, memperkuat komunikasi dan koordinasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan konservasi lingkungan. Dengan terpenuhinya aspek-aspek tersebut, wisata hiu paus berpotensi menjadi sumber kesejahteraan masyarakat sekaligus tetap menjaga kelestarian sumber daya laut yang menjadi daya tarik utama wisata.

Dalam perspektif teori konflik Dahrendorf, berbagai rekomendasi dan harapan yang disampaikan masyarakat menunjukkan adanya upaya untuk mengurangi ketimpangan yang muncul akibat perbedaan posisi dan akses dalam struktur pengelolaan wisata. Tuntutan mengenai tata kelola yang lebih adil, pemerataan manfaat, peningkatan komunikasi, dan keterlibatan masyarakat merupakan bentuk respons terhadap distribusi otoritas dan manfaat yang dianggap belum berjalan secara seimbang. Dengan demikian, harapan masyarakat terhadap keberlanjutan wisata hiu paus tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi, tetapi juga pada terciptanya sistem pengelolaan yang partisipatif, transparan, dan mampu memberikan manfaat secara lebih merata kepada seluruh masyarakat.

d. Eskalasi Keluhan dan Dinamika Komunikasi Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eskalasi keluhan dalam pengelolaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu terutama dipicu oleh persoalan ketidakmerataan manfaat, keterlibatan masyarakat yang dianggap belum adil, dominasi kelompok tertentu dalam aktivitas wisata, serta belum optimalnya tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat. Berbagai keluhan dan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan wisata hiu paus umumnya disampaikan melalui forum musyawarah desa, rapat koordinasi, kegiatan sosialisasi, maupun melalui perwakilan kelompok yang ada di masyarakat. Melalui berbagai forum tersebut, masyarakat berupaya menyampaikan keluhan serta pandangan mereka mengenai pengelolaan wisata hiu paus yang sedang berlangsung.

Dalam perspektif teori konflik Dahrendorf, berbagai keluhan dan aspirasi masyarakat merupakan bentuk kesadaran masyarakat terhadap kepentingan yang mereka miliki. Kesadaran tersebut kemudian mendorong masyarakat untuk menyuarkan tuntutan, kritik, dan aspirasi melalui berbagai forum komunikasi yang tersedia. Dengan demikian, keluhan masyarakat tidak hanya dapat dipahami sebagai bentuk ketidakpuasan individu, tetapi juga sebagai manifestasi dari perbedaan kepentingan yang muncul akibat distribusi otoritas dan manfaat yang belum sepenuhnya merata.

Pembahasan

Perkembangan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu menunjukkan adanya perubahan fungsi sumber daya laut dari yang sebelumnya dipandang sebagai bagian dari aktivitas perikanan menjadi sumber daya yang memiliki nilai konservasi dan ekonomi. Pada awalnya, sebagian masyarakat nelayan menganggap hiu paus sebagai hama karena keberadaannya di sekitar bagang dapat merusak jaring ketika mencari makan. Perubahan pandangan mulai terjadi setelah adanya penelitian dan sosialisasi dari lembaga konservasi yang memperkenalkan nilai ekologis hiu paus serta potensinya sebagai daya tarik wisata.

Perubahan tersebut tidak hanya memengaruhi cara masyarakat memandang hiu paus, tetapi juga mengubah struktur sosial dan ekonomi masyarakat Desa Labuhan Jambu. Masyarakat yang sebelumnya sangat bergantung pada sektor perikanan mulai memperoleh peluang untuk terlibat dalam kegiatan wisata, baik sebagai operator wisata, pengelola perahu, penyedia penginapan, pemandu wisata, pedagang, maupun penyedia jasa transportasi. Dengan demikian, perkembangan wisata hiu paus telah menciptakan ruang ekonomi baru di tengah masyarakat.

Namun, perkembangan kegiatan wisata juga melahirkan struktur pengelolaan yang menempatkan setiap aktor pada posisi dan kewenangan yang berbeda. Pada tahap awal, pengelolaan wisata masih bersifat sederhana dan mengandalkan kesepakatan antara pemerintah desa, kelompok masyarakat, operator wisata, serta lembaga konservasi. Hubungan antaraktor pada masa tersebut masih relatif harmonis karena para pihak memiliki kepentingan yang relatif sama, yaitu mengembangkan potensi wisata hiu paus sebagai sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat.

Dalam perspektif teori konflik Dahrendorf, keadaan tersebut menunjukkan awal pembentukan struktur otoritas dalam pengelolaan wisata hiu paus. Dahrendorf memandang otoritas sebagai bagian yang melekat pada posisi seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi sosial, bukan semata-mata sebagai kekuasaan individual (Susilo, 2021). Artinya, ketika pembagian tugas dan kewenangan mulai terbentuk, pada saat yang sama terbentuk pula posisi sosial yang memiliki tingkat otoritas berbeda.

Oleh karena itu, perkembangan wisata hiu paus tidak dapat dipahami hanya sebagai proses peningkatan kegiatan pariwisata. Perkembangan tersebut juga membentuk struktur sosial baru yang menciptakan perbedaan posisi antara pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan dan pihak yang lebih banyak menjalankan keputusan. Perbedaan inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar munculnya konflik sosial dalam pengelolaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu.

1. Ketimpangan Distribusi Manfaat sebagai Faktor Penguat Konflik Sosial

Meskipun wisata hiu paus telah memberikan manfaat ekonomi bagi sebagian masyarakat, tetapi manfaat tersebut belum dirasakan secara merata. Sebagian masyarakat menilai bahwa keuntungan wisata lebih banyak diterima oleh kelompok yang memiliki akses langsung terhadap pengelolaan. Hal itu menimbulkan kekecewaan, kecemburuan sosial, serta ketidakpuasan terhadap sistem pengelolaan. Dengan demikian, ketimpangan distribusi manfaat dapat dipahami sebagai faktor yang memperkuat konflik yang sebelumnya telah terbentuk akibat perbedaan otoritas. Oleh sebab itu, selama akses terhadap pengelolaan dan manfaat ekonomi masih dinilai tidak seimbang, maka potensi munculnya konflik akibat ketidakpuasan akan tetap terdapat di tengah masyarakat.

2. Kelompok Kepentingan sebagai Bentuk Kesadaran Kolektif Masyarakat

Konflik dalam pengelolaan wisata hiu paus berkembang secara bertahap. Pada awalnya, konflik masih bersifat laten karena hubungan antaraktor relatif harmonis. Namun, meningkatnya aktivitas wisata serta ketidakmerataan kewenangan dan manfaat membuat sebagian masyarakat mulai menyadari adanya ketimpangan. Ketidakpuasan yang awalnya dirasakan secara individual berkembang menjadi kesadaran bersama, sehingga mendorong mereka untuk membentuk kelompok kepentingan guna memperjuangkan akses, hak, dan manfaat yang mereka anggap belum terpenuhi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konflik memiliki fungsi sosial tertentu. Individu yang memiliki posisi serta kepentingan objektif yang relatif sama membentuk kesadaran bersama dan selanjutnya memperjuangkan kepentingan melalui tindakan kolektif.

3. Dinamika Komunikasi sebagai Mekanisme Pengendalian Konflik

Konflik merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan sosial karena setiap struktur otoritas menciptakan kelompok dengan kepentingan berbeda. Dalam konteks pengelolaan wisata hiu paus, meskipun konflik telah berkembang ke dalam bentuk yang lebih nyata, namun masih terdapat ruang sosial yang dapat digunakan untuk melakukan negosiasi antaraktor. Masyarakat masih menggunakan musyawarah desa, rapat koordinasi, sosialisasi, dan forum kelompok sebagai saluran utama untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi. Oleh karena itu, kualitas komunikasi antaraktor menjadi faktor penting dalam dinamika konflik wisata hiu paus.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa konflik dalam pengelolaan wisata hiu paus masih dapat dikelola melalui komunikasi dan negosiasi antaraktor. Dalam hal ini, forum komunikasi memiliki posisi penting dalam menjaga agar perbedaan kepentingan dapat disampaikan melalui mekanisme sosial yang dapat diterima oleh seluruh pihak. Selain itu, mekanisme tersebut dapat memperjelas pembagian peran dan kewenangan yang selama ini menjadi salah satu sumber ketidakpuasan.

4. Konflik Sosial dan Tantangan Keberlanjutan Pengelolaan Wisata Hiu Paus

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, dapat dipahami bahwa konflik sosial dalam pengelolaan wisata hiu paus tidak hanya dapat dipandang sebagai bentuk pertentangan antaraktor. Konflik juga menjadi indikator adanya persoalan dalam distribusi otoritas, akses, dan manfaat. Oleh karena itu, penyelesaian konflik membutuhkan perbaikan pada struktur pengelolaan, peningkatan keterlibatan

masyarakat, pemerataan manfaat, kejelasan pembagian kewenangan, serta penguatan komunikasi antaraktor.

Dengan demikian, keberlanjutan wisata hiu paus bergantung pada kemampuan para aktor untuk membangun tata kelola yang dapat diterima masyarakat. Tata kelola tersebut perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kondisi sosial masyarakat, keterlibatan para pihak, dan konservasi sumber daya laut. Upaya tersebut menjadi bagian penting untuk mengurangi ketimpangan sekaligus mendukung keberlanjutan wisata hiu paus yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperoleh dukungan sosial dari masyarakat di Desa Labuhan Jambu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pengelolaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu telah memberikan peluang ekonomi baru bagi masyarakat, tetapi pada saat yang sama memunculkan konflik sosial akibat perbedaan kewenangan, akses, dan distribusi manfaat. Struktur pengelolaan menempatkan pemerintah desa, BLUD, dan operator wisata pada posisi yang memiliki otoritas lebih besar, sedangkan sebagian masyarakat memiliki keterlibatan dan akses yang lebih terbatas. Kondisi tersebut membentuk hubungan superordinat dan subordinat sebagaimana dijelaskan dalam teori konflik Ralf Dahrendorf.

Konflik berawal dari pembentukan struktur otoritas, kemudian berkembang melalui perbedaan akses dan kepentingan, ketimpangan distribusi manfaat, terbentuknya kesadaran kelompok, serta munculnya tindakan dan tuntutan kolektif. Ketidakmerataan manfaat ekonomi juga memperkuat kecemburuan sosial dan ketidakpuasan terhadap sistem pengelolaan wisata. Ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem pengelolaan wisata hiu paus terlihat melalui keluhan, kritik, tuntutan, melalui forum musyawarah, hingga tindakan kolektif seperti penyegelan kantor BLUD. Kondisi ini menunjukkan perubahan konflik dari yang sebelumnya bersifat laten menjadi konflik yang lebih nyata serta mendorong terbentuknya kelompok kepentingan di masyarakat.

Dengan demikian, konflik dalam pengelolaan wisata hiu paus tidak hanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi, tetapi juga dengan distribusi otoritas dan kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan. Oleh karena itu, keberlanjutan wisata hiu paus memerlukan tata kelola yang lebih transparan, adil, partisipatif, pembagian kewenangan yang jelas, pemerataan manfaat, serta komunikasi yang efektif antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Bagi Pengelola

Pemerintah Desa, BLUD, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan wisata hiu paus perlu memperkuat sistem tata kelola wisata yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel. Kejelasan mengenai pembagian peran, kewenangan, serta pengelolaan manfaat wisata perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat guna meminimalkan kesalahpahaman dan potensi konflik di kemudian hari.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat Desa Labuhan Jambu perlu memperkuat komunikasi, mematuhi aturan pembagian kerja yang adil, serta mendukung musyawarah bersama kelompok sadar wisata (pokdarwis) dan pemerintah desa. Forum tersebut dapat menjadi sarana

penyampaian aspirasi, penyelesaian permasalahan, serta evaluasi bersama terhadap pengelolaan wisata hiu paus sehingga potensi konflik dapat diselesaikan secara lebih cepat dan terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprillianto, C., Panjaitan, T. W. S., & Rolalisasi, A. (2024). Implementasi Pendekatan Arsitektur Ekologis Pada Ekowisata Dusun Bambu Bandung. *ETNIK: Jurnal Ekonomi–Teknik*, 3(1), 70-76.
- Baihaqi, F., & Annida, S. B. (2024). The Social and Cultural Impact of Marine Tourism on Coastal Communities: A Qualitative Study at Tanjung Lesung Beach. *International Journal of Contemporary Sciences*, 2(1), 75-82.
- Creswell, J. W. (2020). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan (Edisi ke-3)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eraku, S. S., Pambudi, M. R., & Kobi, W. (2023). Inovasi Berkelanjutan: Memperkuat Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Wisata Hiu Paus yang Berkelanjutan di Desa Batubarani. *Geosfera: Jurnal Penelitian Geografi (GeoJPG)*, 2(1), 1-8.
- Fahrunnisa, F., Soetarto, E., & Purnaningsih, N. (2016). Konsistensi Akses Sumber Agraria di Kawasan Hutan Dodo Jaran Pusang, Kabupaten Sumbawa, NTB. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 4(2), 145-151.
- Ferdian, K. J., Idrus, I. A., & Tondo, S. (2021). Dampak Ekowisata Bahari dalam Perspektif Kesejahteraan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan Pesisir. *JIPAGS: Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies*, 3(1), 481-499.
- Fitria, A. D., Sianturi, A. C. K., Salwa, F., Haridani, H., Manik, H. F., Khairini, K., Dasopang, L. M., Lestari, N., Rahmawati, N., Sagala, S. S., & Arika, R. (2024). Perilaku dan Sikap Karakteristik serta Ekonomi Masyarakat Pesisir di Dusun XIV Desa Percut. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1068-1078.
- Gatra, P. (2024). Ekowisata Berbasis Hiu Paus di Indonesia: Strategi Konservasi atau Ancaman Baru?. *Altasia Jurnal Pariwisata Indonesia*, 6(1), 95-107.
- Hariyadi, B. R., Rokhman, A., Rosyadi, S., Yamin, M., & Runtiko, A. G. (2024). The Role of Community-Based Tourism in Sustainable Tourism Village in Indonesia. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(7), 1-24.
- Januarti, N. E., & Pinasti, V. I. S. (2021). Strategi Pengembangan Lingkungan Sebagai Kawasan Desa Wisata di Sendangsari, Pajangan, Bantul, DIY. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 12(1), 71-86.
- Jayadi, K., & Abduh, A. (2021). Social Impact of Cultural Tourism in Indonesia: The Case of Tana Toraja. *International Journal of Cultural Heritage*, 6, 1-12.
- Jumiati, W. S., Udu, & Ibrahim, I. (2023). Relasi Kuasa dalam Novel Tanah Bangsawan Karya Filiananur. *Jurnal Pendidikan Bahasa*, 13(1), 1-10.
- Maulana, I. (2021). Konflik Sosial Masyarakat Transmigrasi dengan Masyarakat Lokal dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Riset dan Inovasi Pendidikan*, 1(2), 113-125.
- Masjhoer, J. M. (2021). *Pengantar Wisata Bahari*. Yogyakarta: Khitah Publishing.

- Masjhoer, J. M., & Mazaya, A. F. A. (2024). *Wisata Bahari*. Bandung: CV. Widina Media Utama.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Novri Susan. (2021). *Teori Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Putri, P. K. (2022). Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan terhadap Perdamaian. *Journal of Diplomacy and International Relations*, 2(1), 16-34.
- Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A Theory of Access. *Rural Sociology*, 68(2), 153-181.
- Ridwan, M., AM, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42-51.
- Ristiawan, R., & Tiberghien, G. (2021). A Critical Assessment of Community-Based Tourism Practices in Nglanggeran Ecotourism Village, Indonesia. *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 9(1), 26-37.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, E. E. (2022). Blue Tourism: Treating Marine Ecosystems and Increasing. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 16(2), 138-148.
- Suryani, D. (2016). Konflik Dan Resolusi Konflik Perbandingan Di Sambas Dan Sampit. *Jurnal Penelitian Politik*, 9(1), 143-158.
- Susilo, R. K. D. (2021). *20 Tokoh Sosiologi Modern: Biografi Para Peletak Sosiologi Modern (Cetakan IV)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nurhidayati, S., Edrial, Rahayu, S., Wijayanti, N., & Ayu, I. W. (2022). Dampak Ekowisata Hiu Paus terhadap Perilaku Sosial Masyarakat Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano. *Jurnal Riset Kajian Teknologi dan Lingkungan*, 5(2), 89-95.
- Widiawati, Damayanti, S. P., & Harikosala, M. D. (2025). Persepsi Wisatawan dalam Minat Berkunjung ke Destinasi Wisata Hiu Paus Teluk Saleh Sumbawa. *Journal of Responsible Tourism*, 4(3), 961-966.
- Wijayanti, N., & Nurhidayati, S. (2024). Pengaruh Langsung Ekowisata Hiu Paus terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Sumbawa Indonesia. *Journal of Global Sustainable Agriculture*, 4(2), 160-166.
- Yusrizal, F., & Asmoro, A. Y. (2020). Dampak Sosial Budaya Pariwisata: Masyarakat Majemuk, Konflik dan Integrasi Sosial di Yogyakarta. *Jurnal Pariwisata*, 7(2), 92-105.
- Zakarias, J. D. (2021). Dampak Pembangunan Pariwisata terhadap Perubahan So-sial Masyarakat Lokal di Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Ilmiah Society*, 1(1), 1-15.